



## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
<b>BAB II : SOSIAL KEAGAMAAN KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>8</b>
<b>BAB III : HASIL KUNJUNGAN KERJA</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV: REKOMENDASI</b>	<b>22</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 membentuk Tim Kunjungan Kerja pada masa reses salah satunya ke Provinsi Kalimantan Timur.

### **B. Dasar Kunjungan Kerja**

Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada:

1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 01/DPR RI/ 2020.
4. Keputusan rapat internal Komisi VIII.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

- a. Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk menjalin komunikasi intensif antara DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga kemasyarakatan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk terhadap APBN khususnya dana dekonsentrasi.
- c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

## 2. Tujuan

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat.

### D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Kalimantan Timur ini dilaksanakan pada tanggal 04-08 Oktober 2023.

### E. Jadwal Pertemuan dan Obyek yang ditinjau

Jadwal Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

**JADWAL ACARA  
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI  
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
TANGGAL 04-08 OKTOBER 2023**

NO.	HARI/TGL	ACARA	KET
1.	<b>RABU, 04 OKTOBER 2023</b>		
	Pkl. 06.35 WIB	Anggota Tim Kunker sudah berkumpul di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta	<i>Check-in</i> 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
	Pkl. 07.35 WIB	<i>Take Off</i> dari Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.	Dengan pesawat GA 564
	Pkl. 11.05 WITA	Tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dan transit di VIP Room	Penjemputan oleh Protokol Pemprov
	Pkl. 12.00 -13 WITA	ISHOMA (Sholat Jumat)	RM Dandito

	Pkl. 13.30 WITA	<p>Pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Timur; Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur; Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Walikota Balikpapan, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, perwakilan Baznas Provinsi Kalimantan Timur dan BWI.</p> <p><b>Tema:</b></p> <p>Pengawasan dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana.</p>	<p>Tempat: Asrama Haji UPT Balikpapan.</p> <p>Dihadiri oleh pejabat dari Kemenag RI, Kemensos RI, KemenPPPA RI, BNPB, BPKH, Baznas dan BWI</p>
	Pkl. 15.30	Break ISHOMA	
	Pkl. 16.30 WITA	Peninjauan Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur.	Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur
	Pkl. 17.25 WITA	Tiba di Hotel Novotel, Balikpapan	Setkom VIII DPR RI
	Pkl. 20.00 WITA	Makan malam bersama Kementerian Sosial RI	Setkom VIII DPR RI
<b>Kamis, 05 Oktober 2023</b>			
	Pkl. 07.00 WITA	Sarapan Pagi di Hotel Novotel	Hotel Novotel
	Pkl. 10.00 – 12.00 WITA	Pertemuan dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Balikpapan	Kantor Kemenag Balikpapan

	Pkl. 13.30 WITA	ISHOMA	
	Pkl. 14.30 – 16.30 WITA	Pertemuan dengan BAZNAS dan BWI Balikpapan	Kantor BAZNAS Balikpapan
	Pkl. 17.30 WITA	Tiba di Hotel Novotel, Balikpapan	Setkom VIII DPR RI
	Pkl. 20.00 WITA	ISHOMA	Setkom VIII DPR RI
<b>Jumat 06 Oktober 2023</b>			
	Pkl. 07.00 WITA	Sarapan Pagi di Hotel Novotel	Hotel Novotel
	Pkl. 10.00 – 12.00 WITA	Pertemuan dengan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala MAN 2 Samarinda  Peresmian Gedung Madrasah dan PLHUT	Dihadiri Wakil Menteri Agama RI
	Pkl. 13.30 WITA	ISHOMA	Rumah Kepala Kanwil Kemenag Prov Kaltim
	Pkl. 14.30 – 16.30 WITA	Peninjauan Gedung Madrasah Aliyah 2 Samarinda	
	Pkl. 17.30 WITA	Tiba di Hotel Novotel, Balikpapan	Setkom VIII DPR RI
	Pkl. 20.00 WITA	ISHOMA	Setkom VIII DPR RI
<b>Sabtu, 07 Oktober 2023</b>			
	Pkl. 07.00 WITA	Sarapan Pagi di Hotel Novotel	Hotel Novotel
	Pkl. 10.00 – 12.00 WITA	Pertemuan dengan Pendamping PKH Samarinda dan Koordinator Provinsi	Kafe Panorama Samarinda

	Pkl. 13.30 WITA	ISHOMA	
	Pkl. 14.30 – 16.30 WITA	Diskusi dengan Para Pendamping PKH	Dihadiri ibu Sri Wulan
	Pkl. 17.30 WITA	Tiba di Hotel Novotel, Balikpapan	Setkom VIII DPR RI
	Pkl. 20.00 WITA	ISHOMA	
<b>Minggu, 08 Oktober 2023</b>			
	Pkl. 07.00 WITA	Sarapan Pagi di Hotel Novotel	Hotel Novotel
	Pkl. 10.00 – 11.00 WITA	Rapat Internal Tim Kunker Komisi VIII DPR RI	Setkom VIII DPR RI
	Pkl. 11.30 WITA	Perjalanan menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan	Protoko;
	Pkl. 12.30 WITA	<i>Boarding</i>	Protokol
	Pkl. 13.25 WITA	<i>Take off</i> dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta	Pesawat GA 567
	Pkl. 14.35 WIB	Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta	Protokol

## **BAB II DEMOGRAFI, SOSIAL DAN KEAGAMAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **Jumlah Penduduk Miskin**

Penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,66 ribu orang (dari 112,66 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 113,32 ribu orang pada September 2022). Periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,66 ribu orang dari 112,66 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 113,32 ribu orang pada September 2022.

Garis Kemiskinan pada September 2023 tercatat sebesar Rp768,120-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp546,669,- (71,17 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp221,451,- (28,83 persen).

Pada September 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 4,65 orang anggota rumah tangga. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

Pada Maret 2023, rata-rata 1 (satu) rumah tangga miskin di Kalimantan Timur memiliki 4,65 anggota rumah tangga. Sehingga secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga di Kalimantan Timur pada Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.571.758,-/rumah tangga/bulan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2022 – September 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2023 sebesar 0,784 , turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,989.



Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,226 menjadi 0,118.

## Pembangunan Keagamaan

Pembangunan keagamaan merupakan upaya mewujudkan agenda peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk 3.725.279 jiwa terdiri dari:

1. Islam 3.131.630 jiwa / 84.1 %,
2. Kristen 322.765 jiwa / 8.7 %,
3. Katolik 155.452 jiwa / 4.2 %,
4. Hindhu 28.436 jiwa / 0.8 %,
5. Budha 44.060 jiwa / 1.2%.
6. Konghuchu 32.075 jiwa / 0.9%.
7. Lainnya 5.456 jiwa / 0.1%.

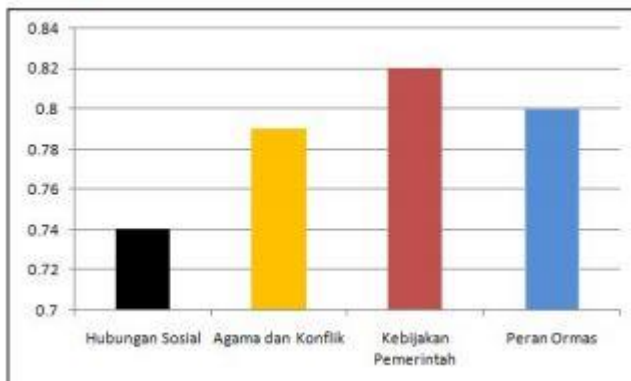
Data di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	A g a m a / Religion							Lainnya Others	Jumlah Total
	Islam <i>Islam</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Protestan <i>Protestant</i>	Hindu <i>Hindist</i>	Budha <i>Budhist</i>	Konghucu <i>Confu-cianism</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Paser	218.485	11.222	9.330	622	888		2	12	240.561
2. Kutai Barat	79.283	36.776	51.928	52	35		1	251	168.326
3. Kutai Kartanegara	602.357	12.020	37.924	2.433	209		15	209	655.167
4. Kutai Timur	338.505	23.619	49.118	2.061	179		26	-	413.508
5. Berau	212.864	13.593	24.015	234	728		8	3	251.445
6. Penajam Paser Utara	179.446	2.798	8.165	97	27		-	-	190.533
7. Balikpapan	658.587	13.133	55.301	1.764	7.055		9	1	735.850
8. Samarinda	695.197	20.241	68.808	20.681	34.831		32.001	4.969	876.728
9. Bontang	146.906	2.848	14.060	329	107		7	1	164.258
10. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-		-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2015</b>	<b>3.131.630</b>	<b>155.452</b>	<b>322.765</b>	<b>28.436</b>	<b>44.060</b>	<b>32.075</b>	<b>5.456</b>	<b>3.725.279</b>
<i>Total</i>	2014	3.277.332	151.080	328.560	90.541	38.135	2.525	1.771	3.889.644
	2013	2.957.049	159.430	328.560	34.087	38.125	525	1.771	3.519.547
	2012	2.957.049	159.430	328.560	34.087	38.125	525	1.771	3.519.547

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Dari segi kerukunan umat beragama, Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan indeks kerukunan sangat baik, dengan angka indeks 0,79 (kategori sangat baik). Ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Kalimantan Timur dalam kondisi yang sangat kondusif. Kejadian konflik antaretnik di Tarakan dan Bulungan tampaknya tidak banyak memengaruhi persepsi publik terhadap isu hubungan keagamaan antarumat beragama di Kalimantan Timur.

**Tabel 5.1:** Indeks Kerukunan Berdasarkan Variabel



(Sumber: Jurnal Analisa).

Data di atas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel yang diukur menunjukkan indeks yang positif. Tiga dari empat variabel di atas berada pada level yang sangat positif dan satu variabel berada pada level baik (variabel 1, hubungan sosial). Hal yang menarik dari data di atas adalah variabel hubungan sosial yang “hanya” mendapatkan nilai baik (0,74) atau terendah dari tiga variabel lainnya. Ini menunjukkan ada aspek-aspek tertentu dalam relasi sosial yang masih menyisakan sedikit persoalan meski levelnya kecil. Sebaliknya, variabel ketiga (peran pemerintah) yang mendapatkan indeks tertinggi menunjukkan adanya kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah untuk mengelola kerukunan.

## **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 77,44 atau meningkat 0,56 poin dibandingkan capaian tahun 2021 (76,88).

Peningkatan terjadi pada semua komponen penyusun IPM, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Peningkatan terjadi pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Berikutnya, pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,81 menjadi 13,84 tahun.

Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 9,84 tahun menjadi 9,92 tahun pada tahun 2022.

Selain itu peningkatan juga terjadi komponen pengeluaran ril per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012) sebesar 12,64 juta Rupiah, meningkat 525 ribu rupiah (4,33 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi di Pulau Kalimantan, bahkan menduduki peringkat ke-3 secara nasional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, setelah DKI Jakarta (peringkat 1) dan DI Yogyakarta (peringkat 2).

Dari lima Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, empat berstatus tinggi dan satu masih berstatus sedang Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara berstatus tinggi sedangkan Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur capaian dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

## **PEMBANGUNAN GENDER**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga tahun 2022 mencapai angka 85,95 dari 100 yang diharapkan dari pembangunan nasional. Dari IPG 85,95 dapat disimpulkan capaian pembangunan manusia yang dicapai laki-laki di Kaltim lebih tinggi daripada perempuan.

IPG Kaltim yang hingga tahun 2022 baru mencapai 85,95 tersebut, cerminan dari IPM (Indks Pembangunan Manusia). Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih besarnya disparitas gender di Kaltim.

BPS juga mengingatkan, disparitas gender terjadi di semua kabupaten/kota di Kaltim. Kabupaten Paser merupakan wilayah dengan disparitas gender tertinggi dengan IPG yang hanya sebesar 71,19. Sementara Kota Balikpapan merupakan wilayah dengan disparitas gender terendah, dengan IPG sebesar 89,83.

## **INDEKS RAWAN BENCANA**

Kalimantan Timur merupakan provinsi kedua terluas di Indonesia setelah Papua dengan luas wilayah kurang lebih 245.237,80 km<sup>2</sup> atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia dengan kepadatan penduduk mencapai 15 jiwa per km persegi.

Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur dengan wilayah yang memiliki potensi industri pertambangan yang cukup besar terutama batubara dan migas. Beberapa sungai yang ada di wilayah ini adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyur, Sungai Sesayap, Sungai Telen, dan Sungai Wahan.

Ancaman atau potensi bencana di Kalimantan Timur adalah potensi bencana banjir, Kebakaran Permukiman, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur termasuk ke dalam daerah yang berada pada indeks bencana tinggi dan sedang.

## BAB III

### KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

#### **Pertemuan dengan Pemerintahan Provinsi Kaltim, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kaltim, Kepala UPT Asrama Haji Balikpapan, dan SKPD**

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Bpk. Ashabul Kahfi, melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur (diwakili Kepala Dinas Sosial), Kepala Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Timur; Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur; Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Walikota Balikpapan, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, perwakilan Baznas Provinsi Kalimantan Timur dan BWI.

Acara didahului dengan pembagian bantuan Atensi dan PKH kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Provinsi Kalimantan Timur dari Sentra Banjarmasin dan Kementerian Sosial RI.





Pembagian bantuan sosial didampingi oleh Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI, yaitu Dirjen Rehabilitas Sosial, Bpk. Pepen Nazaruddin. Selain bantuan dari Kementerian Sosial, BPKH juga memberikan bantuan berupa distribusi rendang kaleng.



Pertemuan dan diskusi tentang bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebencanaan dilakukan di Aula UPT Asrama Haji Balikpapan. Hadir pada acara tersebut SKPD Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Penanggulangan Bencana didampingi para mitra Komisi VIII DPR RI dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, BNPB, KPPPA, BPKH, dan BAZNAS.

Pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Sosial yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur memaparkan mengenai berbagai pertanyaan yang telah diajukan oleh Komisi VIII DPR RI terkait permasalahan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Penanggulangan Bencana sebagai berikut:



## 1. Permasalahan Sosial

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan bantuan untuk saptas panti.
- b. Di Provinsi Kaltim secara keseluruhan, terdapat 225 ribu KUBE. Kegiatan KUBE dipusatkan untuk membantu para Keluarga Sangat Miskin yang awalnya dilakukan secara terpisah oleh beberapa instansi dengan cakupan tidak hanya menasar keluarga yang tidak mampu. Namun

karena ada kebijakan dari Gubernur Kaltim, KUBE dikhususnya untuk Keluarga Sangat Miskin. Keberhasilan KUBE dapat menekan angka kemiskinan sebanyak 0.04%, masih belum sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

- c. Permasalahan utama penyaluran bantuan, seperti KIP, KIS, KUBE, dan lain-lain terkendala oleh masalah pendataan. Terdapat perbedaan data antara data orang miskin dari Dukcapil dengan data Kemensos.
- d. Terdapat 133 kecamatan di Kaltim dengan 1 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di masing-masing kecamatan.
- e. Tali asih untuk TKSK dirasakan sangat kecil tidak sebanding dengan tugas yang diemban oleh TKSK. Untuk itu, diminta bantuan Komisi VIII DPR RI agar alokasi anggaran Kesejahteraan TKSK di daerah dapat dibiayai oleh APBN atau adanya pengaturan yang pasti mengenai pemberian tali asih bagi TKSK oleh Pemerintah Daerah.

## **2. Permasalahan Bencana**

- a. Potensi bencana alam di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran pemukiman, banjir, longsor, dan kebakaran lahan.
- b. BPBD Kaltim mendapatkan dana dekonsentrasi dari Kemendagri untuk penguatan kelembagaan.
- c. Pada tahun 2023 tingkat bencana menunjukkan angka penurunan.
- d. BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan menyampaikan aspirasinya yaitu mengenai adanya kendala yaitu dalam PP 18 tahun 2016 bahwa BPBD diubah menjadi dinas di daerah.

## **3. Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Saat ini Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah wewenang setingkat dinas meskipun masih gabung dengan bidang KB dan Kependudukan.
- b. Meminta untuk ditambah anggaran mengenai sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **Peninjauan Asrama Haji Embarkasi Balikpapan**

Setelah melakukan pertemuan, tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan fasilitas Asrama Haji UPT Balikpapan yang tengah



membangun tambahan gedung asrama yang didanai dari SBSN, meninjau fasilitas theater Manasik Haji, dan kamar-kamar jemaah.



Ketua Komisi VIII menyampaikan rasa terimakasih dan apreasiasinya serta penghargaan kepada kepada UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan yang telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji.

"Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi untuk UPT Asrama Haji Balikpapan yang telah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah serta masyarakat umum. Fasilitas di UPT Asrama Haji Balikpapan tidak kalah bagusnya dengan fasilitas hotel. Kamarnya bersih, modern, layaknya di fasilitas hotel berbintang. Di asrama haji Balikpapan juga telah tersedia ruang aula besar untuk pertemuan atau pernikahan. Sarana manasik haji dan ruang theater yang berisi video edukasi manasik haji. Semoga ke depan fasilitas yang ada di asrama haji lebih meningkat.



Sebagai komitmen Komisi VIII DPR RI, telah dialokasikan anggaran SBSN untuk penambahan gedung baru asrama haji sebesar 38 miliar. Semoga pembangunannya cepat selesai agar tahun 2024 dapat digunakan. Selamat dan sukses selalu untuk Asrama Haji Balikpapan”, ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI.

#### **Pertemuan dengan Kepala Kemenag Kota Balikpapan**

Pada hari berikutnya, Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI melanjutkan pertemuan dengan Kepala Kemenag Kota Balikpapan yang diwakili oleh Kepala Seksi Haji dan Umrah serta Kasi Madrasah, Bimas Islam, dan Kasi Zakat dan Wakaf.



Pada kesempatan itu Kemenag Kota Balikpapan menyampaikan beberapa aspirasi terkait aspirasi peningkatan pelayanan bidang keagamaan, di antaranya:

1. Terbatasnya anggaran untuk kehumasan yang dimiliki oleh Kemenag Balikpapan, aspirasinya mohon bantuannya untuk dialokasikan anggaran pengadaan tambahan mobil operasional. Kota Balikpapan merupakan pintu masuk Provinsi Kaltim, yang saat ini diproyeksikan sebagai IKN sehingga sangat membutuhkan hal tersebut.
2. Usulan pembangunan KUA di 2 Kecamatan di Balikpapan yang belum ada bangunan KUA-nya, statusnya masih menyewa.
3. Anggaran SBSN untuk PLHUT atau KUA terkendala oleh status tanah yang berstatus sebagai tanah wakaf.
4. SDM Kemenag Balikpapan, terutama dari PNS-nya, sedikit sehingga terkendala dalam pencapaian target. Namun, dengan jumlah yang terbatas tersebut berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Tingginya minat masyarakat untuk berhaji di Kota Balikpapan. Kendala di tahun 2023 adalah masalah pendamping bagi jemaah haji lansia. Diusulkan agar pengesahan BPIH tidak terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan haji agar para jemaah dapat melakukan pelunasan dengan memiliki waktu yang cukup.

6. Agar para SDM di PHU Kota Balikpapan mendapat kesempatan untuk menjadi petugas haji PPIH di Arab Saudi.

### **Pertemuan dengan Kepala Kemenag Provinsi Kaltim dan Kepala MAN 2 Samarinda**

Tim kunjungan kerja melanjutkan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim dan Kepala MAN 2 Samarinda, yaitu untuk peresmian gedung madrasah, PLHUT, dan KUA di Provinsi Kaltim. Acara dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI. Anggota kunjungan kerja yang hadir pada acara tersebut adalah Ibu Sri Wulan.



Gedung Madrasah, PLHUT, dan KUA diresmikan secara simbolis di Aula MAN 2 Samarinda sebagai komitmen Kementerian Agama RI yang anggarannya dibahas di Komisi VIII DPR RI untuk meningkatkan pelayanan di bidang agama dan pendidikan keagamaan.

### **Pertemuan dengan Pendamping PKH**

Pada hari berikutnya, tim kunjungan kerja melakukan pertemuan dengan para Pendamping PKH di Samarinda untuk mendiskusikan masukan dan aspirasinya di bidang penyaluran bantuan sosial PKH di Kota Samarinda dan di Provinsi Kaltim secara umum.



Para pendamping PKH menyampaikan aspirasinya mengenai aspek kesejahteraan pendamping PKH dan pendamping sosial lainnya untuk lebih ditingkatkan.

Kendala-kendala yang ditemui selama menjadi pendamping PKH adalah jauhnya jarak tempuh untuk menemui KPM di masing-masing wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sehingga memerlukan usaha keras dan biaya untuk transportasi yang terkadang tidak mencukupi dan tidak tersedia secara khusus.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

Dari hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, berikut ini rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rapat dengan para mitra kerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

#### **A. Bidang Keagamaan**

1. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan Dirjen PHU Kementerian Agama RI mengenai permasalahan rekrutmen Petugas Haji, yang berdasarkan aspirasi Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, agar diprioritaskan para SDM di PHU, yang secara langsung telah banyak berjasa dalam melayani jemaah haji.
2. Perlu disampaikan pada saat RDP dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai usulan dinaikkannya kuota haji bagi Kota Balikpapan mengingat jumlah antrian jemaah mencapai 28 tahun sebagai akibat tingginya minat masyarakat untuk berhaji.
3. Perlu disampaikan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI atau kepada BPKH mengenai aspirasi pengadaan mobil operasional untuk Kantor Kemenag Kota Balikpapan, mengingat Kota Balikpapan merupakan pintu masuk Provinsi Kaltim yang diproyeksikan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
4. Perlu disampaikan kepada Dirjen Bimas Islam Kemenag RI untuk mengalokasikan anggaran pembangunan KUA di 2 kecamatan di Kota Balikpapan yang sampai saat ini masih menyewa.

#### **Bidang Sosial**

1. Komisi VIII DPR RI perlu meningkatkan pengawasan pada penyaluran bantuan sosial, baik PKH, Kartu Sembako, dan program Atensi, agar penyalurannya tepat sasaran dan diperoleh solusi yang tepat untuk berbagai kendala yang ditemui di lapangan.
2. Perlu disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Sosial mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi para pendamping PKH dan SDM Sosial lainnya.

### **Bidang Bencana**

1. Komisi VIII DPR RI perlu mengundang Kementerian Dalam Negeri dan BNPB untuk mendiskusikan permasalahan status BPBD. Mayoritas dari beberapa daerah yang dikunjungi oleh Komisi VIII DPR RI, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur mengeluhkan mengenai status tersebut.
2. Perlu ditingkatkan alokasi anggaran BNPB agar dapat mencakup berbagai daerah yang membutuhkan anggaran dalam penanggulangan bencana.
3. Pemerintah Daerah perlu diundang dalam rapat-rapat di Komisi VIII DPR RI untuk membahas mengenai alokasi anggaran kebencanaan di Daerah.

### **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Perlu disampaikan ke Menteri PPPA mengenai aspirasi ditambahnya alokasi anggaran untuk Badan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim.
2. Komisi VIII DPR RI perlu menyampaikan kepada Menteri PPPA mengenai peningkatan DAK Bidang Perlindungan Anak.